

Pendampingan Masyarakat Sebagai Fasilitator Menuju *E-Planning* Hasil Musrenbang Kelurahan

Erialdy¹, Agus Iwan Mulyanto², Sugeng Lubar Prastowo³, Ade Indra Permana⁴
Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang, Jl. Maulana Yusuf, 15118
¹erialdy@unis.ac.id, ²ai_mulyanto@unis.ac.id, ³slubar@unis.ac.id, ⁴aipermana@unis.ac.id

ABSTRAK

Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah pemerintahan akan sangat ditentukan oleh bagaimana kualitas perencanaan pembangunannya. Upaya pemberdayaan masyarakat sebagai suatu strategi pengelolaan pembangunan mempersyaratkan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, menciptakan akses yang luas untuk berperan aktif, terciptanya demokratisasi pengelolaan pembangunan. Partisipasi merupakan suatu proses yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antar stakeholders sehingga kesepakatan-kesepakatan yang bersifat inovatif lebih mungkin tercipta yang wujudnya adalah musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). *E-planning* merupakan sebuah inovasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dengan mengadopsi perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas data usulan yang masuk dari masyarakat. *E-planning* lahir sebagai sebuah inovasi perencanaan pembangunan berbasis *information technology* untuk membuka partisipasi masyarakat terhadap berbagai usulan pembangunan yang dinilai mampu memotong proses panjang penjangkaran usulan pembangunan di masyarakat agar lebih tepat, terarah dan akurat. Fasilitator sebagai salah satu elemen tim penyelenggara musrenbang tingkat kelurahan memandu peserta dan narasumber untuk terlibat secara aktif, sehingga musrenbang dapat berjalan dengan baik, menghasilkan rencana kerja pembangunan tingkat kelurahan serta proses penjangkaran usulan melalui sistem teknologi dan informasi *e-planning* agar masyarakat dapat mengawal proses pembangunannya.

Kata Kunci : Fasilitator, Musyawarah Perencanaan Pembangunan, *E-planning*

ABSTRACT

The success of development in a government area will be largely determined by the quality of development planning. Community empowerment efforts as a development management strategy require community involvement in the development process, creating broad access to play an active role, creating democratization of development management. Participation is a process that allows for better interaction among stakeholders so that innovative agreements are more likely to be created which take the form of a development planning deliberation (Musrenbang). E-planning is an innovation in the regional development planning system by adopting technological, information and communication developments that can encourage transparency and accountability of proposed data that comes from the public. E-planning was born as an innovation in information technology-based development planning to open public participation in various development proposals that are considered capable of cutting the long process of collecting development proposals in the community to make them more precise, directed and accurate. The facilitator, as an element of the village level musrenbang organizing team, guides participants and resource persons to be actively involved, so that the musrenbang can run well, to produce a village level development work plan. as well as the process of selecting proposals through an e-planning technology and information system so that the public can oversee the development process.

Keywords : Facilitator, Development Planning Deliberation, *E-planning*

1. PENDAHULUAN

Membangun negara tidak hanya membutuhkan modal sumber daya ekonomi yang mudah dilihat, diidentifikasi dan dapat dihitung secara kuantitas, namun juga sumber daya manusia dengan investasi kemampuan dan pengalamannya serta modal kultural atau budaya yang berdasar pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Modal sosial dan kultural yang kuat, erat hubungannya dengan masyarakat berupa kemampuan yang timbul dari adanya kepercayaan dalam komunitas.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah (Sekda Pemkot Tangerang, 2008). Musrenbang merupakan bentuk pembangunan partisipatif di Indonesia yang dilaksanakan di daerah. Dasar pelaksanaan musrenbang adalah amanat Undang-undang yang kemudian oleh pemerintah daerah diturunkan dalam bentuk peraturan daerah dan petunjuk teknis sebagai pedoman bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan musrenbang. Musrenbang merupakan forum bagi pemerintah, legislatif dan pemangku kepentingan pembangunan untuk memahami isu-isu dan permasalahan pembangunan daerah dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas prioritas pembangunan. Dengan harapan tidak ada lagi program-program pembangunan yang tumpang tindih namun sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga sumber daya pembangunan yang terbatas dapat dimanfaatkan dengan optimal.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan untuk semakin membuka ruang partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di daerah, kehadiran jaringan internet membantu komunikasi pemerintah daerah dengan instansi lainnya. Perkembangan teknologi informasi ini telah memaksa pemerintah untuk melakukan transformasi besar-besaran agar selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan masyarakat sudah menjadi kebutuhan utama dalam mengembangkan masyarakat informasi (*information society*). Aspek pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi, selain mempercepat arus

pelayanan juga untuk menciptakan transparansi pelayanan masyarakat.

Di era perubahan yang begitu cepat, kita harus mengedepankan birokrasi supaya lebih cepat agar pelayanan kita mampu bersaing. *E-planning* tidak cuma menjadi media, tapi juga benar-benar mempelajari infrastruktur supaya masyarakat terfasilitasi (Arief R Wismansyah, 2019). Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (*e-planning*) adalah sebuah alat penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dalam penyusunan dokumen perencanaan, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 (Paat et al., 2018). *E-planning* menjadi alat bantu Pemerintah daerah dalam kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan serta selaku koordinator dalam penyusunan program kerja, sehingga perencanaan pembangunan yang telah dibuat dapat berjalan secara efektif, efisien dan terintegrasi.

Dengan *e-planning* berbasis *website*, masyarakat yang mengajukan usulan pembangunan atau kegiatan yang bersifat konstruktif, bisa langsung melihat usulan mereka melalui *website* resmi yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Fungsi dari *website* tersebut adalah menjadikan program yang diajukan oleh pemangku kepentingan bisa lebih akurat, transparan, dan kegiatan lebih tepat sasaran. Pengelompokan jenis usulan pekerjaan lebih mudah, memperpendek waktu rekapitulasi data usulan sehingga warga dapat dengan mudah melihat dan memastikan usulan mereka sudah masuk dan diverifikasi Tim Musrenbang. Kemajuan telepon selular membuat *e-planning* bisa diakses secara langsung melalui jaringan komunikasi internet.

Penginputan hasil musrenbang dengan *e-planning*, juga bagian dari keinginan menjadikan semua aspek pelayanan publik memanfaatkan teknologi informasi. Selain mempercepat arus pelayanan juga untuk menciptakan transparansi pelayanan publik. Maka perlu didisain sebuah program perencanaan yang lebih partisipatif, adil dan merata. Desain program ini mengusahakan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Model ini memberi kepastian dan jaminan

program yang diajukan dapat terealisasi nantinya.

Salah satu komponen Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) adalah Tim Pemandu (BPPD Tangerang Selatan, 2014). Pemandu tidak sama dengan moderator atau pimpinan rapat. Pemandu adalah perancang dan pengelola proses musrenbang agar partisipatif dan dialogis. Pemandu sering disebut juga sebagai fasilitator, berasal dari kata *facilis* yang artinya mempermudah (Djohani, 2008). Fasilitator bertugas untuk menyusun tahap dan langkah-langkah proses musrenbang secara keseluruhan, memfasilitasi proses musyawarah, menguasai berbagai informasi, data dan dokumen profil desa, dokumen RKP Desa, peraturan dan kebijakan tingkat desa yang relevan. Fasilitator juga bisa dijadikan sumber informasi oleh peserta musrenbang baik pada saat pra musrenbang maupun saat memfasilitasi pelaksanaan musrenbang. Hasil akhirnya adalah tersusunnya secara prioritas Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan untuk tahun yang direncanakan.

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk melakukan pendampingan pada masyarakat sebagai Fasilitator, agar partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui pemanfaatan *e-planning* bisa lebih efektif. Faktor dampak yang diharapkan adalah dapat mendorong penguatan kapasitas masyarakat tingkat kelurahan berpartisipasi aktif melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan.

2. PERMASALAHAN

Musrenbang adalah forum musyawarah tahunan yang menjadi dasar pemerintah daerah menentukan arah pembangunan selanjutnya bisa menyediakan informasi yang akurat kepada pemangku kepentingan terkait prioritas pembangunan yang akan maupun belum dilaksanakan. Kebijakan atau program pembangunan yang direncanakan penting untuk disosialisasikan terlebih dahulu, komunikasi pembangunan bukan hanya mentransfer informasi, tetapi upaya membangkitkan partisipasi lokal dalam pembangunan, karena keberhasilan pembangunan terkait erat dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi diperlukan untuk efektivitas suatu program pembangunan dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan,

pelaksanaan dan pemantauan program pembangunan. Rangkaian forum musrenbang tak hanya diwujudkan melalui instrument yang manual dan formal seperti yang dilakukan selama ini (Yunas, 2017). *In the planning process, the use of application of participative techniques based on internet and e-government tools is alleged to increase inclusion of various stakeholders* (Scorza, F., G.L. Casas, 2011). *E-government is information and communication technology that plays an important role in increasing access and efficiency as well as providing government information and services* (Crespo et al., 2018).

3. METODOLOGI

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, yang terdiri atas enam Rukun Warga. Penetapan Kelurahan Kenanga atas dasar Surat Tugas dari Walikota Tangerang yang diterbitkan oleh Sekretariat Daerah nomor : 800/0138-Bapp/2020. Pelaksanaan kegiatan pendampingan dimulai dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020, untuk usulan program pembangunan Kelurahan Kenanga 2021.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan *Participatory Rural Appraisal (PRA)* yaitu pendekatan dalam proses pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat. Melalui pendekatan *Participatory Rural Appraisal*, masyarakat bukan lagi sebagai objek yang menerima program dari atas (*top-down*), melainkan menjadi subjek pembangunan yang merancang program pembangunan dari bawah (*bottom-up*) dengan skala prioritas program pembangunannya. Yang pada akhirnya hasil musrenbang tingkat Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondoh dapat terinput pada *e-planning* pemerintahan daerah Kota Tangerang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggal 3 Desember 2019, Wali Kota Tangerang membuka kegiatan Sosialisasi *e-planning* untuk perencanaan pembangunan tahun 2021, diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota

Tangerang yang dihadiri oleh peserta yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) kecamatan dan kelurahan se-Kota Tangerang, dan Asisten Ekbang Kesra. Lewat sosialisasi ini diharapkan seluruh peserta dapat menguasai kompetensi dan keahlian dalam memanfaatkan sistem informasi berbasis teknologi informasi. Tujuan sosialisasi ini, sebagai informasi pembangunan daerah dalam rangka penyusunan perencanaan agar dapat disusun dengan cepat, mudah dan tepat waktu (Sugiharto Achmad Bagja, 2019).

E-planning Kota Tangerang lahir sebagai sebuah inovasi perencanaan pembangunan berbasis *information Technology* (IT) untuk membuka partisipasi masyarakat selebar-lebarnya terhadap berbagai usulan pembangunan. Keberadaan *e-planning* Pemkot Tangerang juga dianggap mampu memotong proses panjang penjarangan usulan pembangunan di masyarakat agar usulan yang masuk lebih tepat, terarah dan akurat. Dalam hal transparansi, usulan-usulan yang disetujui oleh pemerintah daerah Kota Tangerang dibuka kepada publik agar masyarakat dapat mengawal proses pembangunan di daerahnya. Dengan alamat *e-planning.tangerangkota.go.id*, Pemkot Tangerang mampu menjamin keakuratan data rencana program dan kegiatan pembangunan daerah, mampu memastikan ketepatan sasaran kegiatan, mampu mempermudah pengelompokan jenis usulan program, lebih mudah memperkirakan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan atas usulan kegiatan yang diajukan masyarakat dengan cepat dan tepat.

Kegiatan pengorganisasian musrenbang di Kelurahan Kenanga dimulai dengan pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM), penentuan Fasilitator sebagai pemandu musrenbang, persiapan teknis, penyusunan jadwal dan agenda musrenbang, pengumuman kegiatan musrenbang dan penyebaran undangan kepada peserta dan narasumber serta mengkoordinir persiapan logistik. Fasilitator bertugas untuk menyusun tahap dan langkah-langkah proses musrenbang kelurahan Kenanga meliputi pra musrenbang, pelaksanaan musrenbang dan pasca musrenbang, menterjemahkannya menjadi jadwal atau kalender kegiatan. Fasilitator juga bertugas untuk mengelola proses musrenbang dengan

menjaga, setiap tahap dan langkah musrenbang agar berjalan sesuai dengan rencana, dapat mencapai tujuan dan tepat waktu. Peran lainnya dari Fasilitator yaitu mengelola forum pertemuan dan memfasilitasi proses musyawarah agar mencapainya tujuan, mengatur waktu, menyediakan materi, alat, dan bahan yang diperlukan untuk bermusyawarah dan menegakkan aturan atau prinsip-prinsip musyawarah. Selain itu juga memfasilitasi atau mengatur proses, dan alulintas pembicaraan di antara peserta musyawarah agar berjalan dengan tertib, efisien dan efektif. Fasilitator juga dituntut untuk menguasai berbagai informasi, data, dan dokumen seperti profil kelurahan, dokumen rencana kerja pembangunan kelurahan tahun yang telah berjalan, peraturan dan kebijakan pemerintah daerah yang relevan, sehingga bisa dijadikan sumber informasi oleh peserta musrenbang kelurahan.

Musrenbang kelurahan Kenanga didahului dengan musyawarah atau rembug warga di tingkat RW dan kelompok masyarakat. Rembug Warga merupakan pertemuan yang dihadiri oleh tokoh masyarakat tingkat Rukun Warga (RW) untuk mengadakan musyawarah, berrembug bersama membicarakan program pembangunan yang akan diusulkan ke musrenbang kelurahan. Rembug warga menggambarkan terjadinya proses permusyawaratan untuk mencapai tujuan bersama. Peserta rembug yang hadir bukan semata memenuhi undangan namun sebagai pihak yang memiliki agenda untuk melakukan *assessment* penggalian isu-isu dari pemangku kepentingan, sehingga pada saat forum rembug dilaksanakan, semua bahan yang diperbincangkan bersama adalah bahan-bahan yang telah mengalami pengolahan dan pematangan atau proses-proses validasi bersama. Tujuan dari penyelenggaraan rembug warga untuk merumuskan peta potensi pengembangan dengan program strategis menjadi bahan yang akan dimatangkan menjadi rekomendasi yang akan disampaikan kepada pihak Kelurahan untuk mendapatkan respon perubahan kebijakan. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pelaksanaan rembug warga semakin memperkuat keberadaan dan meningkatnya peran warga dalam proses pembangunan di wilayahnya. Kepentingan

atau kebutuhan program atau kegiatan pembangunan warga telah dihimpun melalui rembug warga yang diselenggarakan di setiap RW (Deky Aji Suseno, 2016).

Tahapan Penyelenggaraan Musyawarah rencana pembangunan Kelurahan Kenanga, terdiri atas tiga tahapan. Pertama, pra-Musrenbang. Tahapan pra-musrenbang kelurahan Kenanga adalah tahapan awal yang digunakan untuk mengatur pengorganisasian Musrenbang, yaitu pembentukan orang-orang yang akan bekerjasama untuk mengatur pelaksanaan musrenbang Kelurahan, diantaranya pembentukan tim penyelenggara musrenbang dan tim pemandu musrenbang, penyusunan jadwal dan agenda musrenbang dan penyebaran undangan kepada peserta dan narasumber serta mengkoordinir persiapan logistik (tempat, konsumsi, alat dan bahan). Waktu pelaksanaan musrenbang hanya satu hari. Media publikasi musrenbang yang digunakan adalah surat undangan yang ditandatangani Kepala Kelurahan. Anggota masyarakat yang menerima undangan yaitu perangkat Kelurahan, Ketua RT, Ketua RW, Ketua PKK tingkat RW, dan beberapa orang tokoh masyarakat lainnya.

Kedua tahapan Pelaksanaan. Tahap pelaksanaan musrenbang Kelurahan Kenanga merupakan tahapan inti dari penyelenggaraan musrenbang Kelurahan. Pada tahapan ini partisipasi dari peserta musrenbang sangat diperlukan. Diawali dengan pembukaan acara musrenbang kelurahan, pemaparan draf rancangan awal rencana kerja kelurahan, diskusi tentang kesepakatan program prioritas, tanggapan masyarakat tentang pokok penting hasil diskusi, tanggapan pihak Kecamatan tentang pemaparan tersebut, dan penutupan acara musrenbang kelurahan. Komponen peserta musrenbang kelurahan Kenanga dapat terlihat pada tabel1, di bawah ini.

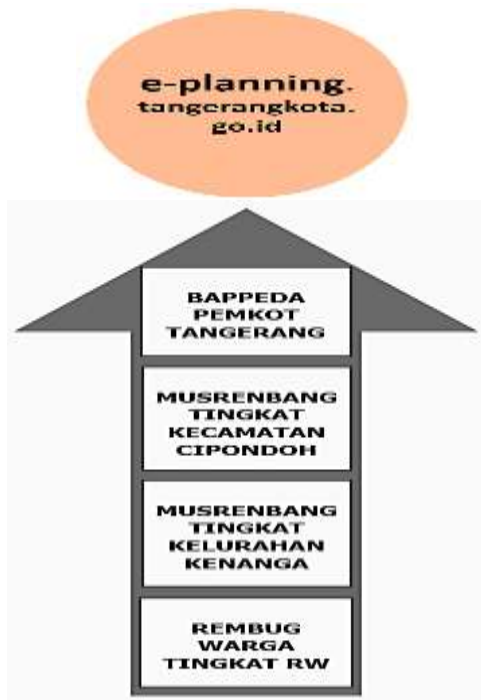
Tabel 1. Komponen Peserta Musrenbang

Komponen Peserta Musrenbang Kelurahan Kenanga	
Kepala Kecamatan	Ketua PKK
Sekretaris Kecamatan	Ketua Posyandu
SKPD Kecamatan	Koordinator BKM
Kepala Kelurahan	Polkja FKTS
Sekestaris Kelurahan	Para Ketua Rukun Warga
SKPD Kelurahan	Para Ketua Rukun Tetangga
Fasilitator	Para Kader
Babinkamtibmas	Para Tokoh Agama
Kepala Puskesmas	Para Tokoh Masyarakat
Ketua LPM	Ketua Karang Taruna

Ketiga tahapan Pasca musrenbang. Tahapan pasca musrenbang kelurahan Kenanga adalah tahapan akhir dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam musrenbang kelurahan, yaitu rapat kerja tim perumusan hasil musrenbang kelurahan untuk mempersiapkan draf akhir Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan 2021 sampai menjadi keputusan Kepala Kelurahan, menyusun daftar tabel prioritas masalah kelurahan dan melakukan penginputan ke *e-planning.tangerangkota.go.id* oleh SKPD kelurahan Kenanga yang telah memiliki kode *admin* dan *passwordnya* serta pembekalan tim delegasi yang akan menghadiri musrenbang tingkat Kecamatan.

Perjalanan usulan program pembangunan hasil musrenbang yang sudah menjadi Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan Kenanga 2021 untuk bisa sampai terinput ke *e-planning.tangerangkota.go.id* dimulai dari usulan program pembangunan dari tingkat Rukun Warga (RW) melalui kegiatan rembug warga diteruskan ke Kelurahan. Ditingkat kelurahan, pihak kelurahan memetakan dan menetapkan usulan dari RW menjadi Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan Kenanga 2021 melalui kegiatan musrenbang tingkat kelurahan dan diinput ke *e-planning*. Kemudian diteruskan dipembahasan tingkat kecamatan melalui kegiatan musrenbang tingkat kecamatan. Hasil musrenbang ditingkat kecamatan, usulan teruskan ke Satuan Kerja Pembangunan Daerah Kota Tangerang dan dipublikasikan kemasyarakat umum melalui *e-planning.tangerangkota.go*.

id. Perjalanan usulan program seperti yang terlihat pada gambar 1, dibawah ini :



Gambar 1. Perjalanan usulan Program Pembangunan Menuju *e-planning*

Hasil Musrenbang Kelurahan Kenanga berupa program pembangunan yang terinput di *e-planning* Pemkot Tangerang, seperti yang terlihat pada table 2, di bawah ini :

Tabel 2. Hasil Musrenbang Desa Kenanga Tahun 2021.

No	Program Pembangunan Hasil Musrenbang	Jumlah
1	Pembangunan Drainase/Gorong-gorong	30
2	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan	30
3	Pembangunan PJU Lingkungan	7
4	Pembangunan Lapangan Futsal	1
5	Pelatihan Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING)	2
6	Pelatihan Tanggap Darurat Bencana	2
7	Pelatihan Usaha <i>Online</i>	1
8	Pelatihan Budaya Ikan Konsumsi	1
9	Pelatihan Daur Ulang Sampah Bagi Lansia	1
10	Pelatihan Ketrampilan PSM	1
11	Pelatihan Manajemen Kurban	1
12	Pelatihan Pembibitan Tanaman Pelindung	1
13	Pelatihan Pemilahan Sampah	1
14	Pelatihan Sablon	1
15	Pelatihan Tata Rias	1
16	Pelatihan Manajemen Keuangan Koperasi	1
17	Kampung Kader Bina Keluarga Balita (BKB)	2
18	Kampung Kader Bina Keluarga Lansia (BKL)	1
19	Kampung Kader Bina Keluarga Remaja (BKR)	1
20	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Balita	1
21	Workshop Pembuatan Rumah Kebun Bibit	1
22	Pengadaan Pojok Baca	1

Sumber : e-planning.tangerangkota.go.id

5. KESIMPULAN

Hasil musrenbang yang menjadi dasar pemerintahan kelurahan Kenanga untuk menentukan arah pembangunan, menyediakan informasi yang akurat kepada pemangku kepentingan terkait prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan. Pada pelaksanaan musrenbang kelurahan Kenanga, Fasilitator dan seluruh komponen yang terlibat telah bekerja secara maksimal sehingga pemberdayaan masyarakat kelurahan Kenanga dalam merencanakan pembangunan dapat terwujud. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kelurahan Kenanga dari segi representasi peserta yang hadir sudah mewakili seluruh unsur masyarakat yang ada. Usulan yang disampaikan masyarakat dalam musrenbang berasal dari kesepakatan masyarakat bawah melalui rembug warga tingkat RW, agar perencanaan pembangunan di wilayahnya sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapai yang kemudian disampaikan oleh ketua atau perangkat RW yang mewakili mereka dalam musrenbang kelurahan.

Terdokumentasikannya hasil-hasil musrenbang mulai dari kelurahan dan kecamatan pada e-planning.tangerangkota.go.id merupakan salah satu terobosan komunikasi informasi pembangunan dalam peningkatan pelayanan publik. Pola sistem komunikasi *e-planning* dinilai mampu menjadi sebuah inovasi dalam proses perencanaan pembangunan untuk menyajikan data yang akurat, kegiatan yang tepat sasaran, pengelompokan jenis usulan pekerjaan lebih mudah hingga memperpendek waktu rekapitulasi data usulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief R Wismansyah. (2019). [https://nasional.republika.co.id/berita/q1yn7v335/pemko tangerang percepat pembangunan dengan e-planning](https://nasional.republika.co.id/berita/q1yn7v335/pemko_tangerang_percepat_pembangunan_dengan_e-planning).
- BPPD Tangerang Selatan. (2014). *Bimbingan Teknis Reflikasi Pemetaan Partisipatif Dan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Musrenbang Kelurahan*.

- Crespo, C., Ripoll, V., Tamarit, C., & Valverde, R. (2018). Institutional characteristics and managers' perceptions of accounting information: impact on e-government use and organisational performance. *Revista Espanola de Financiacion y Contabilidad*, 47(3). <https://doi.org/10.1080/02102412.2017.1416743>
- Deky Aji Suseno. (2016). Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Di Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. *Jurnal STIE Semarang*, 8(2), 122–137.
- Djohani, R. (2008). *Panduan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan* (FPPM (ed.)). The Asia Foundation.
- Paat, H. P., Tuju, E. F., & Kalalo, M. Y. B. (2018). Ipteks Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Planning Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Utara. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, 2(02), 11–15. <https://doi.org/10.32400/jiam.2.02.2018.21627>
- Scorza, F., G.L. Casas, and A. C. (2011). *Onto-planning: innovation for regional development planning within EU convergence framework. In lecture notes in computer science, B. Murgante, O. Gervasi, A. Iglesias, D. Taniar, and B.O. Apduhan, Eds. Ber.*
- Sekda Pemkot Tangerang. (2008). *Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.*
- Sugiharto Achmad Bagja. (2019). <https://www.tangerangkota.go.id/berita/detail/19563/percepatan-proses-pembangunan-dengan-e-planning-2021>.
- Yunas, N. S. (2017). Efektivitas E-Musrenbang di Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Berparadigma Masyarakat. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1). <https://doi.org/10.26618/ojip.v7i1.387>